

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Puji Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 disusun sebagai tahun pertama dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 bidang Perkeretaapian, dimana telah diberlakukannya restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan di seluruh kementerian/lembaga, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 memuat kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 disamping dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, secara substansi juga sejalan dengan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2025-2029.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang.

Jakarta, Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., MM, IPM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19670608 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 DASAR HUKUM	1
1.2 LATAR BELAKANG	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	3
BAB 2 DRAFT RENCANA STRATEGIS 2025-2029	11
2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN	11
2.2 SASARAN PRIORITAS NASIONAL 2025 – 2029.....	12
2.3 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025 – 2029	12
2.4 SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025 – 2029.....	14
2.5 ARAH KEBIJAKAN BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2025 – 2029	14
2.6 STRATEGI BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2025 – 2029	15
2.7 TARGET KINERJA BIDANG PERKERETAAPIAN 2025 – 2029	19
BAB 3 EVALUASI RENCANA STRATEGIS 2015-2019	21
3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/PENDANAAN	21
3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT	23
BAB 4 RENCANA KINERJA TAHUN 2025	30
4.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	30
4.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025.....	31
4.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2025	32
BAB 5 PENUTUP	34
LAMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Strategi Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2020-2024	16
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Bidang Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029.....	20
Tabel 3.1	Evaluasi Realisasi Anggaran DJKA Tahun 2020 – 2024	21
Tabel 3.2	Capaian RPJM Nasional Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024	26
Tabel 3.3	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) DJKA 2020-2024	27
Tabel 4.1	Target Indikator Kinerja Program DJKA Tahun 2025	33
Tabel I.1	Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	36
Tabel I.1	Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.....	36
Tabel I.2	Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2025.....	37
Tabel I.3	Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025.....	38
Tabel I.4	Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025.....	39
Tabel I.5	Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2025.....	40
Tabel I.6	Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretapian Tahun 2025....	41
Tabel I.7	Indikator Kinerja Kegiatan Balai Perawatan Perkeretapian Tahun 2025...	42
Tabel I.8	Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tahun 2025.....	43
Tabel I.9	Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tahun 2025	44
Tabel I.10	Indikator Kinerja Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan Tahun 2025	45
Tabel I.11	Indikator Kinerja Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang Tahun 2025.....	46
Tabel I.12	Indikator Kinerja Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Palembang Tahun 2025	47

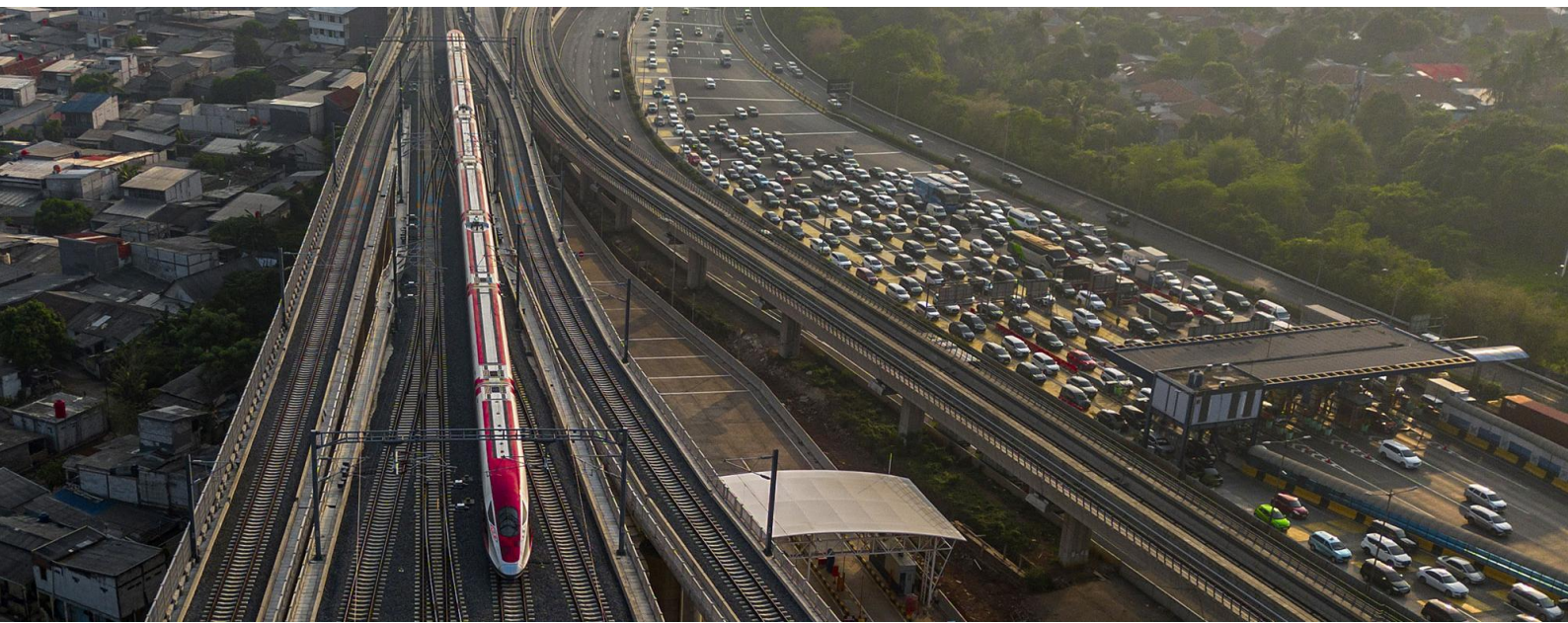
Tabel I.13	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta Tahun 2025	48
Tabel I.14	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung Tahun 2025	49
Tabel I.15	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang Tahun 2025.....	50
Tabel I.16	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya Tahun 2025.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	3
Gambar 3.1	Perkembangan Anggaran DJKA Tahun 2020-2024.....	22
Gambar 3.2	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) DJKA 2020-2024	29





B A B 1

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum mengenai penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 terdiri dari peraturan perundangan berikut

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP-DJKA 10 TAHUN 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.2 LATAR BELAKANG

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan.

Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2025-2029, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 yang merumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2025 serta sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang perlu diselesaikan pada tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 memuat kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya. Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal

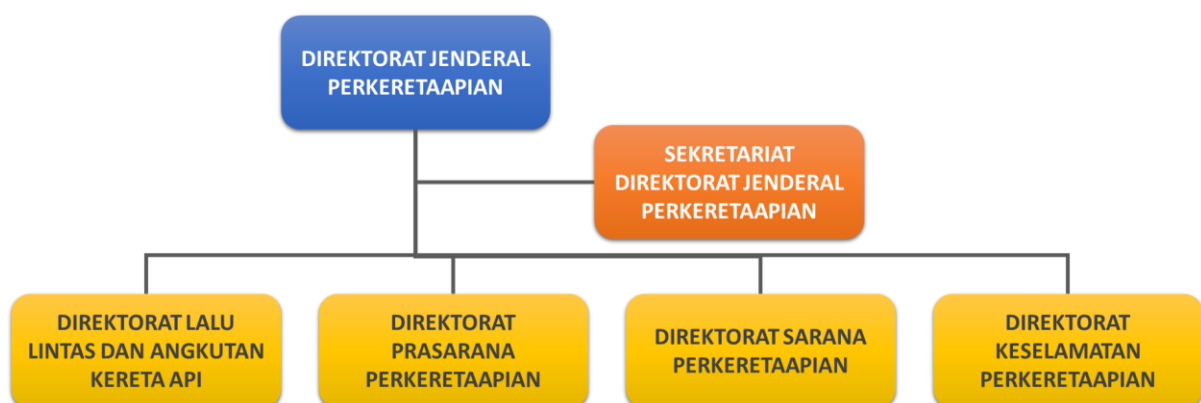
Perkeretaapian di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada tahun 2025 dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2025-2029.

1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, menyatakan bahwa tugas pokok Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- c. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian; dan
- d. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur

Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di lalu lintas dan angkutan kereta api. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api,

- perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
 - c. Penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
 - e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan
 - f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

4. Direktorat Sarana Perkeretaapian

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- c. Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;

- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Untuk Meningkatkan efektifitas pelaksanaan prasarana, fasilitas bimbingan dan pengawasan teknis terhadap kualitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta koordinasi pelaksanaan operasional penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan kereta api bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian membentuk balai-balai yang merupakan sebagai pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.63 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.64 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.65 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.119 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.36 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi balai-balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

1) Balai Teknik Perkeretaapian

Balai Teknik Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana perkeretaapian dan pengawasan penyelenggaraan sarana, dan keselamatan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas Balai Teknik Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana perkeretaapian;
- c. Pelaksanaan pengawasan kegiatan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perlintasan sebidang sementara, perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;

- e. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan;
- f. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian;
- g. Pelaksanaan pengawasan keselamatan perkeretaapian;
- h. Pelaksanaan sosialisasi dan tindakan korektif pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

2) Balai Pengujian Perkeretaapian

Balai Pengujian Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengujian prasarana, sarana, dan sumber daya manusia perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengujian Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala jalur kereta api, bangunan perkeretaapian dan fasilitas operasi kereta api;
- b. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian berpengerak dan tanpa pengerak;
- c. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala peralatan khusus;
- d. Pelaksanaan pengujian kompetensi awak sarana perkeretaapian;
- e. Pelaksanaan pengujian kompetensi petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian;
- f. Pelaksanaan pengujian kompetensi Penguji Prasarana, Penguji Sarana, Inspektur Prasarana, Inspektur Sarana, dan Auditor Perkeretaapian;
- g. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

3) Balai Perawatan Perkeretaapian

Balai Perawatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian milik negara. Dalam melaksanakan tugas Balai Perawatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perawatan berkala sarana perkeretaapian milik negara;
- b. Pelaksanaan perawatan berat sarana perkeretaapian milik Negara;
- c. Pelaksanaan pengendalian kualitas perawatan sarana perkeretaapian milik Negara;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, logistik, dan hubungan masyarakat;
- e. Balai Perawatan Perkeretaapian dapat juga melaksanakan fungsi perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian bukan milik negara.

4) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api ringan Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api ringan;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, dan kemitraan;
- c. Penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan;
- d. Penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api ringan;
- e. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- f. Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

5) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan

Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api di Pulau Sulawesi. Dalam melaksanakan tugas Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan angkutan penumpang dan angkutan barang;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api di Pulau Sulawesi;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian di Pulau Sulawesi, Penyusunan grafik perjalanan kereta api, dan kemitraan;
- d. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengaturan, pengoperasian, dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana;
- e. Penyusunan dan pengusulan tarif angkutan penumpang dan barang serta pelaksanaan pemanfaatan aset;
- f. Penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api;
- g. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- h. Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, teknologi informasi dan data, serta pengelolaan Barang Milik Negara;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



B A B 2

DRAFT RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI

Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang Adil dan Makmur. Visi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Periode Tahun 2025 - 2029 adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi Presiden dan Wakil Presiden RI akan dicapai dengan 8 misi yang disebut ASTA CITA. Perumusan ASTA CITA didasarkan pada semangat nasionalisme, patriotisme, dan kebangsaan yang tinggi, serta komitmen untuk melayani rakyat dengan sepenuh hati. ASTA CITA Presiden dan Wakil Presiden RI adalah:

1. Memperkuat ideologi, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.2 SASARAN PRIORITAS NASIONAL 2025 – 2029

Dalam menjalankan Visi Presiden dan Wakil Presiden RI 2025 – 2029, dijabarkan melalui 8 misi utama yang disebut dengan Asta Cita. Dari 8 misi Asta Cita, terdapat misi yang perlu dukungan di bidang infrastruktur. Terdapat arahan dari prioritas nasional yang menjadi penugasan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Prioritas Nasional (PN) Asta Cita yakni sebagai berikut:

1. PN 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
2. PN 03 – Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
3. PN 05 – Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
4. PN 06 – Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
5. PN 07 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.

2.3 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025 – 2029

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2025 – 2029.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi empat perspektif,

yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2025 – 2029, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SS 1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional;
2. SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Nasional;
3. SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Nasional;
4. SS 4. Menurunnya Dampak Lingkungan Transportasi Nasional;
5. SS 5. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi Nasional;
6. SS 6. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Transportasi Yang Kompeten;
7. SS 7. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di kemenhub.

Sasaran Strategis SS1, SS2, dan SS3 mewakili 3 *core-business* Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas, aksesibilitas, dan kapasitas (2) pelayanan, dan (3) keselamatan dan keamanan transportasi. Ketiga sasaran strategis tersebut berada pada level *Customer Perspective* (CP) yang merepresentasikan hasil/*outcome* kinerja Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik (*public service*) di bidang transportasi.

Sasaran Strategis SS4 dan SS5 mewakili bisnis proses utama (*Internal Business Perspectives*/IBP) di Kementerian Perhubungan untuk menghasilkan kinerja pelayanan transportasi pada SS1, SS2, SS3. Bisnis proses utama dari Kementerian Perhubungan terkait teknis penyediaan layanan transportasi adalah (1) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan transportasi yang berkualitas yang diejawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, jaringan pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku, serta (2) mengembangkan SDM transportasi yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan transportasi secara prima.

Sasaran Strategis SS6 mewakili upaya Kementerian Perhubungan untuk menyediakan sumber daya dan pranata kerja yang baik sebagai landasan (*Learning and Growth Perspectives*/LGP) agar mampu menjalankan bisnis proses secara akuntabel sesuai prinsip *good governance*. Keberhasilan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan *core business* saat ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang mengukur tingkat capaian suatu K/L dalam meningkatkan kualitas organisasi pada sejumlah area perubahan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan tahun 2025 – 2029 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output*, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) sasaran penunjang.

2.4 SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025 – 2029

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan perkeretaapian dalam menyelesaikan isu-isu strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian. Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempertimbangkan sasaran strategis di Kementerian Perhubungan yang mana sasaran menggambarkan fokus utama menyelesaikan isu strategis dan permasalahan perkeretaapian berkaitan dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian.

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029:

1. Sasaran Program 1 (SP1): Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian;
2. Sasaran Program 2 (SP2): Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian;
3. Sasaran Program 3 (SP3): Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian;
4. Sasaran Program 4 (SP4): Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi perkeretaapian;
5. Sasaran Program 5 (SP5): Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.5 ARAH KEBIJAKAN BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2025 – 2029

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan serta mendorong terwujudnya tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 (T.1) Terwujudnya perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan dengan arah kebijakan, yakni:
 - a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian melalui pembangunan jaringan kereta api antar kota, perkotaan, logistik dan reaktivitas jalur kereta api mati.
 - b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting, peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api, peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian, peningkatan subsidi pelayanan kereta api, peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender dan peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api.
 - c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api, peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian, peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian, peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan

- sarana perkeretaapian, peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian, peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian, pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang dan peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang.
2. Tujuan 2 (T.2) Terwujudnya bisnis proses dalam penyelenggaraan bidang transportasi perkeretaapian yang berkualitas dengan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kualitas manajemen serta pengaturan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan manajemen penyelenggaraan transportasi perkeretaapian, peningkatan pengelolaan sistem informasi dan teknologi transportasi perkeretaapian, peningkatan pengelolaan komunikasi dan informasi publik transportasi perkeretaapian, peningkatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian.
 3. Tujuan 3 (T.3) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berkualitas dengan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui peningkatan pengelolaan organisasi dan SDM transportasi perkeretaapian dan peningkatan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan umum transportasi perkeretaapian.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut diatas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua (2) program dan sembilan (9) kegiatan terdiri dari:

1. Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan:
 - a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian.
 - c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.
2. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
 - c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.
 - e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

2.6 STRATEGI BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2025 – 2029

Pembangunan bidang perkeretaapian dituntut memiliki perencanaan yang matang karena membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, diantaranya meliputi biaya pembebasan tanah, sarana dan prasarana. Antusiasme masyarakat yang ingin merasakan layanan perkeretaapian, mendorong kepada pemerintah dapat menyediakan layanan angkutan umum massal berbasis rel di berbagai lokasi di Indonesia.

Kegiatan-kegiatan pembangunan perkeretaapian yang masih perlu dilakukan penajaman kesiapan dan pembiayaan dilakukan dengan strategi penyelenggaraan perkeretaapian sebagai berikut.

Tabel 2.1 Strategi Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian	AK1 Peningkatan jaringan kereta api antar kota	• Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jaringan kereta api cepat (<i>high speed</i>) • Pembangunan jaringan kereta api <i>medum speed</i> • Pembangunan jembatan/terowongan • Pembangunan/peningkatan fasilitas operasional (persinyalan, telekomunikasi, instalasi listrik)
	AK2 Peningkatan jaringan kereta api perkotaan	• Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api perkotaan • Peningkatan jalur kereta api perkotaan termasuk jalur ganda • Pembangunan jalur kereta api massal cepat • Pembangunan jalur kereta api ringan • Pembangunan sistem angkutan umum massal berbasis rel di perkotaan IKN • Pembangunan/pengembangan stasiun terintegrasi • Pembangunan fasilitas operasi kereta api (sistem persinyalan, telekomunikasi, sistem listrik termasuk LAA)
	AK3. Peningkatan jaringan kereta api logistik	• Pembangunan dan pengintegrasian jaringan jalan rel Pulau Sumatera (Trans Sumatera Railways) untuk mendukung peningkatan angkutan komoditas utama dan efisiensi logistik barang • Pengembangan sistem logistik rel di Pulau Jawa untuk mengoptimalkan pemafaatan kapasitas jalur rel ganda/<i>double track</i> untuk logistik angkutan khusus • Pengembangan stasiun barang/<i>dry port</i> dalam mendistribusikan logistik barang • Pengembangan jaringan kereta api komoditas utama di Pulau Kalimantan
	AK4 Reaktivasi jalur kereta api mati	• Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) reaktivasi jalur kereta api • Pembangunan reaktivasi jalur kereta api lintas mati • Penyediaan prasarana stasiun, fasilitas operasi
SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	AK5 Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting	• Pembangunan jalur ganda kereta api/<i>double track</i> di Jawa dan Sumatera • Peningkatan elektrifikasi jalur kereta api • Peningkatan/penataan stasiun kereta api • Peningkatan/penggantian fasilitas operasi (sistem persinyalan, telekomunikasi, listrik) • Skema pengadaan dan pengelolaan sarana kereta api yang berkelanjutan
	AK6 Peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api	• Peningkatan persinyalan mekanik ke elektrik • Penambahan interlocking sistem persinyalan • Pembangunan dan peningkatan sistem telekomunikasi analog ke digital • Pengembangan aplikasi kinerja prasarana, sarana dan operasional perjalanan kereta api • Pengembangan aplikasi pengawasan lalu lintas kereta api • Monitoring dan evaluasi kinerja prasarana, sarana dan operasional

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		perjalanan kereta api
	AK7 Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian	• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja pelayanan angkutan kereta api • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja prasarana, sarana angkutan kereta api • Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan angkutan kereta api antarkota dan perkotaan • Pengembangan sistem penerimaan dan respon pengaduan • Pengembangan norma/standar/pedoman/manual pelayanan kereta api perkeretaapian
SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	AK8 Pelaksanaan subsidi pelayanan angkutan KA	• Skema pengadaan sarana kereta api perintis • Pengembangan keberlanjutan dan perbaikan skema PSO dan subsidi yang tepat sasaran • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja layanan PSO dan angkutan perintis
	AK9 Peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender	• Pengembangan standar layanan berkebutuhan khusus • Peningkatan penyediaan aksesibilitas bagi berkebutuhan khusus • Penyediaan kursi prioritas di kereta dan stasiun kereta api • Penyediaan kereta khusus wanita
	AK10 Peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api	• Peningkatan keterpaduan jadwal pelayanan, sistem pembayaran terpadu, sistem informasi terpadu • Penyediaan park and ride di stasiun kereta api • Penyediaan fasilitas non-motorized (pejalan kaki, sepeda) dan berkebutuhan khusus di stasiun kereta api • Penyediaan fasilitas integrasi antarmoda di stasiun kereta api
SP3 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	AK11 Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api	• Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan pelaksanaan self-assessment keselamatan perkeretaapian • Peningkatan kinerja monitoring, evaluasi, inspeksi dan audit penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan efektivitas pelaksanaan standar operasional prosedur tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana perkeretaapian • Peningkatan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan perkeretaapian
	AK12 Peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	• Peningkatan perawatan sarana perkeretaapian • Peningkatan perawatan prasarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian sarana perkeretaapian • Peningkatan pengujian prasarana perkeretaapian • Keberlanjutan skema IMO dan TAC
	AK13 Peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian	• Pemenuhan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan pengujian sarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan prasarana perkeretaapian • Pemenuhan peralatan perawatan sarana perkeretaapian • Pengembangan workshop laboratorium dan simulator • Pengembangan peralatan dan SDM pengujian dan perawatan perkeretaapian

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	AK14 Peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian	- Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian - Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian - Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan prasarana perkeretaapian - Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan sarana KA
	AK15 Peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	- Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian - Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian - Peningkatan sertifikasi perawatan sarana perkeretaapian
	AK16 Peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian	- Peningkatan pendidikan dan latihan kompetensi SDM perkeretaapian - Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM regulator (perencana/Pembina, penguji sarana, penguji prasarana, auditor/inspektur keselamatan) - Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM operator (awak sarana, pengatur perjalanan, tenaga pemeriksa dan perawatan sarana jalur dan bangunan, fasilitas operasi, penjaga perlintasan, pengawas peron, penjaga rumah sinyal, wesel, juru langsir)
SP3 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	AK17 Pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang	- Pemenuhan peralatan keselamatan perlintasan sebidang (pintu perlintasan/early warning system dll) - Penyediaan petugas jaga dan pos jaga - Potensi penutupan perlintasan sebidang liar - Peningkatan perawatan perlintasan sebidang - Pembangunan perlintasan tidak sebidang
	AK18 Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang	- Optimalisasi implementasi kewenangan pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan pengelolaan jalan - Optimalisasi evaluasi perlintasan sebidang dengan melibatkan pemangku kepentingan (Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Bina Marga dan operator)
SP4 Meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bidang perkeretaapian	AK19 Peningkatan kualitas perencanaan di bidang perkeretaapian (rencana pengembangan, rencana teknis, rencana operasional)	- Peningkatan relevansi perencanaan yang sudah dihasilkan - Peningkatan efektivitas tindak lanjut perencanaan yang sudah dihasilkan
	AK20 Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatan kebijakan di bidang perkeretaapian	- Peningkatan kinerja pelaksanaan monitoring, evaluasi dan kendali mutu implementasi kebijakan - Peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi terhadap implementasi kebijakan
SP5 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	AK21 Peningkatan manajemen penyelenggaraan transportasi perkeretaapian	- Penguatan sistem e-performance dalam penilaian kinerja - Penguatan penerapan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
Direktorat Jenderal Perkeretaapian	AK22 Peningkatan pengelolaan sistem informasi dan teknologi transportasi perkeretaapian	- Pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi administrasi dan teknis di setiap direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Pengintegrasian sistem dan pengelolaan database/big data Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	AK23 Peningkatan pengelolaan komunikasi dan informasi publik transportasi perkeretaapian	- Peningkatan layanan publikasi kepastakaan - Peningkatan layanan kehumasan dan hubungan antar lembaga - Peningkatan pelaksanaan kerjasama luar negeri - Peningkatan publikasi dan edukasi publik tentang penyelenggaraan KA - Peningkatan pengelolaah berita dan pelayanan informasi dan dokumentasi
	AK24 Peningkatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian	- Peningkatan sosialisasi tahapan pembentukan perundang-undangan - Peningkatan pelaksanaan advokasi hukum dan sosialisasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	AK25 Peningkatan pengelolaan organisasi dan SDM transportasi perkeretaapian	- Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Pembinaan karier dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan - Pengelolaan kegiatan konseling pegawai - Penerapan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Pengembangan pola dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkeretaapian. - Modernisasi layanan sumber daya manusia melalui transformasi digital - Peningkatan efektivitas kegiatan bimbingan teknis dan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Penguatan efektivitas pengelolaan kepegawaian di lingkungan lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	AK26 Peningkatan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan umum transportasi perkeretaapian	- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara terintegrasi - Penyusunan review dan penyempurnaan dokumen perencanaan secara berkelanjutan - Peningkatan kualitas perencanaan anggaran di lingkungan DJKA - Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran (e-monitoring) di lingkungan DJKA - Peningkatan penatausahaan serta kualitas pengelolaan dan pemanfaatan BMN di lingkungan DJKA

Sumber: *Draft* Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 Bidang Perkeretaapian

2.7 TARGET KINERJA BIDANG PERKERETAAPIAN 2025 – 2029

Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur yang mengidentifikasi keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Target indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 sebagaimana berikut:

**Tabel 2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Bidang Perkeretaapian
Tahun 2025 – 2029**

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian	IKP 1 Rasio Konektivitas Perkeretaapian	Rasio	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,49
SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	IKP 2.1 Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	95	95	95	96	96	97
	IKP 2.2 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang sesuai Dengan TQI I dan II	%	0,94	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98
	IKP2.3 Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) terhadap Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Nilai	na	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90
SP3 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	IKP 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Rasio	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02
SP4 Meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bidang perkeretaapian	IKP4 Tingkat Kinerja Dukungan Teknis Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai	na	100	100	100	100	100
SP5 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP5 Tingkat Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	86,76	87	88	89	90	91

Sumber: *Draft* Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 Bidang Perkeretaapian



BAB 3

EVALUASI RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

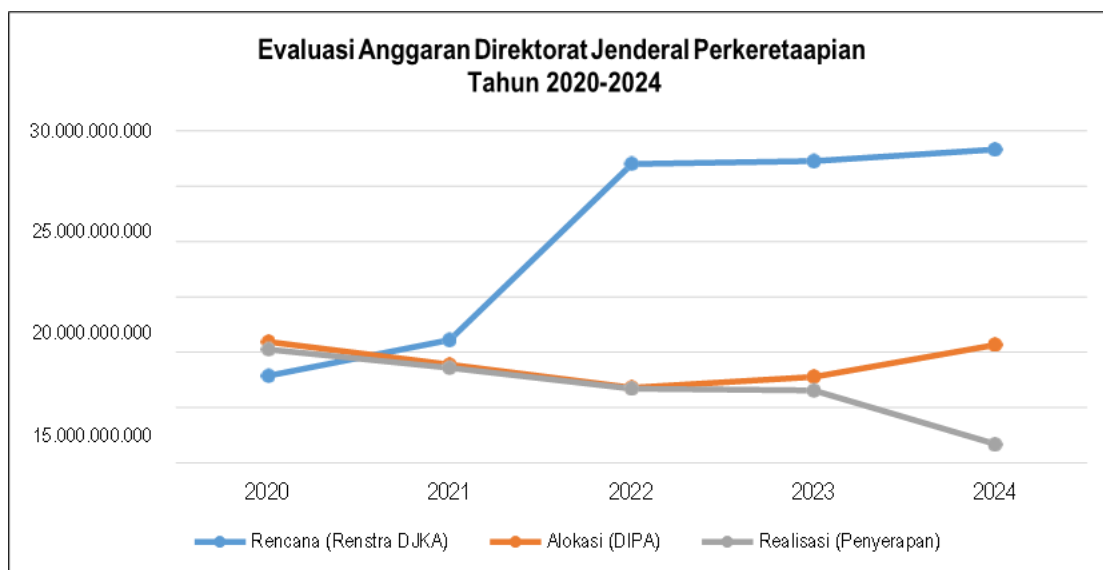
3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/PENDANAAN

Kebutuhan pendanaan yang direncanakan dalam Renstra DJKA 2020 – 2024 sebesar Rp 101,65 triliun. Alokasi pendanaan APBN sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 45,084 triliun (44,35% dari rencana Renstra), artinya alokasi APBN hanya 20-30% dari rencana pendanaan dalam renstra DJKA. Realisasi penyerapan anggaran DJKA terbesar 98,51%. Alokasi anggaran lebih dominan untuk kegiatan Program Infrastruktur Konektivitas (rata-rata di atas 90%) yaitu kegiatan dalam rangka pembangunan dan pelayanan prasarana dan sarana perkeretaapian cukup besar dan sisanya untuk Program Dukungan Manajemen.

Tabel 3.1 Evaluasi Realisasi Anggaran DJKA Tahun 2020-2024

Pendanaan	Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Rencana (Renstra DJKA)	7.869.500.579	11.103.444.048	27.039.668.930	27.293.722.312	28.346.734.942	101.653.070.811
Alokasi (DIPA)	10.944.517.605	8.885.899.982	6.808.136.466	7.776.454.929	10.669.069.412	45.084.078.394
Realisasi (Penyerapan)	10.271.105.807	8.595.949.958	6.706.862.722	6.546.119.112	1.681.062.146 (Triwulan II)	33.801.099.754
Capaian (%)	93,85	96,74	98,51	84,18	15,76	

Sumber: PK DJKA 2020-2024, LAKIP DJKA 2020-2023, LTW1IIDJKA 2024



Gambar 3.1 Perkembangan Anggaran DJKA Tahun 2020-2024

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 akhir adalah sebesar RP. 10.944.517.605. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 10.271.105.807 (93,85%), sehingga jumlah anggaran tidak terserap pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 673.411.797.817.000.

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2021 sebesar Rp 8.885.899.982.000 Terdapat perbedaan dari pagu berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (revisi terakhir) dikarenakan adanya perubahan anggaran SBSN dan BLU serta penambahan anggaran dari LMAN yang baru tercatat pada Januari 2022. Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2021 diperoleh sebesar Rp 8.595.949.958 (96,74%).

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada awal tahun 2022 sebesar Rp 6.728.720.521.000 sedangkan untuk posisi revisi Perjanjian Kinerja (November 2022) terdapat perubahan menjadi Rp 7.086.439.553.000 dan pagu terakhir pada akhir Tahun 2022 sebesar Rp 6.808.136.466.000. Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 sebesar Rp 6.808.136.466.000,-. Terdapat perbedaan dari pagu berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (revisi terakhir) dikarenakan adanya pergeseran/relokasi anggaran blokir dari BA Kemenhub ke BA BUN dan pencatatan atas pengadaan lahan dari LMAN. Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 diperoleh sebesar 6.706.862.722.000 (98,51%).

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada awal Tahun 2023 sebesar Rp7.344.665.225.000 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian), sedangkan pada posisi revisi terdapat perubahan menjadi pagu terkahir Rp. 7.776.454.929.000. Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2023 mencapai Rp. 6.546.119.112 (84,18%).

Alokasi anggaran lebih dominan untuk kegiatan Program Infrastruktur Konektivitas (rata-rata di atas 90%) dan sisanya untuk Program Dukungan Manajemen. Artinya bahwa kegiatan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian cukup besar dalam rangka mewujudkan target kinerja pelayanan perkeretaapian.

3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam menyelenggarakan perkeretaapian nasional pada periode 2020-2024 menetapkan tujuan yang terdiri dari (1) Terwujudnya konektivitas jaringan perkeretaapian yang optimal, terintegrasi dan berkelanjutan; (2) Terwujudnya kinerja pelayanan KA yang optimal; (3) Terwujudnya keselamatan transportasi yang andal.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sepanjang tahun 2020-2024 telah melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi dengan mengacu pada tujuan, sasaran program dan indikator kinerja program yang sudah ditetapkan di dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA10 Tahun 2023.

Capaian indikator kinerja program Direktorat Jenderal Tahun 2020-2024 disampaikan sebagai berikut:

1. IKP 1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah

Nilai rasio keterhubungan antar wilayah selama 5 tahun 2020-2024 cenderung terus meningkat dengan capaian kinerja tahun 2024 triwulan II sudah terpenuhi yang mana jaringan kereta api telah menghubungkan 53 PKN/PKW/KSN, 6 Bandar udara dan 10 Pelabuhan. Sebagai pembandingan rasio konektivitas antar wilayah nasional 0,76 untuk seluruh wilayah nasional.

2. IKP 2 Tingkat Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (Rate of Accident)

Nilai rasio keterhubungan antar wilayah selama 5 tahun 2020-2024 cenderung terus meningkat dengan capaian kinerja tahun 2024 triwulan II sudah terpenuhi yang mana jaringan kereta api telah menghubungkan 53 PKN/PKW/KSN, 6 Bandar udara dan 10 Pelabuhan. Sebagai pembandingan rasio konektivitas antar wilayah nasional 0,76 untuk seluruh wilayah nasional.

Nilai tingkat kejadian kecelakaan transportasi kereta api selama 5 tahun 2020- 2024 terus menurun. Artinya jumlah kejadian kecelakaan kereta api menurun.

Capaian kinerja setiap tahun selama 2020-2024 terpenuhi sesuai target kecuali tahun 2021. Tahun 2024 triwulan II, telah terjadi 4 kejadian kecelakaan kereta api (1 kejadian tabrakan antar kereta dan 3 anjlok). Sebagai pembandingan, jumlah kejadian kecelakaan kereta api di negara Inggris Raya 0 kejadian/tahun, Switzerland 5 kejadian/tahun, Jepang 6 kejadian/tahun, Korea Selatan 20 kejadian/tahun, Perancis dan Jerman 24 kejadian/tahun (Sumber: *Eurostat (2021) Statistics of Rail Accidents by type of accident*, *Japan Transport Safety Board Statistics (Railway)*, *South Korean Ministry of Land Infrastructure and Transport*)

3. IKP 3 Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api

Nilai capaian OTP transportasi kereta api selama 5 tahun 2020-2024 meningkat dengan capaian kinerja setiap tahun terpenuhi sesuai target (capaian 100%). Upaya agar OTP tetap terjaga antara lain: pemantauan kelaikan prasarana dan sarana kereta api, peningkatan keselamatan dan keamanan perlintasan sebidang, penanganan kecelakaan yang cepat agar mengurangi gangguan operasional. Perbandingan capaian kinerja On Time Performance (OTP) di beberapa negara lain diantaranya mengacu pada publikasi Eurostat (Statistics Modal Split of Passenger Transport) dan Statistical Handbook of Japan. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kinerja OTP perjalanan kereta api di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan OTP di negara-negara Jepang (OTP 90-95%), Cina (OTP 90- 95%), Korea Selatan (OTP 90,95%), India (OTP 93,29%), Australia (95%), Jerman (OTP 93,8), Inggris Raya (OTP 93,4%), Perancis (92%) dan Switzerland (OTP 92,5%).

4. IKP 4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api

Nilai capaian kinerja setiap tahun selama 2020-2024 terus meningkat dan sudah terpenuhi sesuai target di dalam Renstra. Jumlah angkutan penumpang terangkut kereta api tahun 2023 sebanyak 429 juta penumpang (naik sebesar 40% dibandingkan tahun 2022).

Pada tahun 2020-2021 jumlah penumpang kereta api rendah diakibatkan adanya pembatasan pergerakan mobilitas akibat pandemic covid-19 dan mulai meningkat sejak 2022 dan terus meningkat di tahun 2023 sejak kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dicabut oleh pemerintah.

Peningkatan jumlah penumpang dengan beroperasi layanan kereta api Makassar-Parepare, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, KA Bandara, KA feeder dan peningkatan layanan kereta api. Perbandingan jumlah angkutan penumpang kereta api rata-rata per bulan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Britania Raya (134 juta orang/bulan), Singapura (103 juta orang/bulan) dan Malaysia (23,5 juta orang/bulan).

5. IKP 5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api

Nilai capaian kinerja setiap tahun selama 2020-2024 terus meningkat dan sudah terpenuhi sesuai target di dalam Renstra. Jumlah barang terangkut kereta api tahun 2023 sebanyak 64,3 juta ton (8,3 juta ton angkutan barang di Pulau Jawa dan 56 juta ton angkutan barang di Pulau Sumatera).

6. IKP 6 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang sesuai dengan Track Quality Index (TDI) II dan II

Capaian kinerja setiap tahun selama 2020-2024 terpenuhi sesuai target. Pengukur jalur kereta api dilakukan bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT KAI (Persero) yang mana jalur kereta api yang terukur sampai tahun 2024 mencapai 5.900 km. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian TQI ini adalah (1) belum tersedianya standar TQI (penyusunan standar selesai Tahun 2024); (2) belum tersedianya data-data empiris yang cukup terkait perbandingan standar serta nilai threshold yang digunakan dalam penyusunan TQI; (3) Pengukuran jalur kereta api di wilayah Sulawesi dan operator lainnya (selain PT. KAI) belum bisa dihitung kinerjanya, dikarenakan perbedaan standar pengukuran yang digunakan di masing- masing alat ukur TQI oleh operator perkeretaapian.

7. IKP 7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian merupakan indikator yang ditetapkan tahun 2023. Nilai capaian IKM selama 2 tahun 2023-2024 meningkat dan terpenuhi sesuai target.

Selain pencapaian-pencapaian selama lima tahun, terdapat aspirasi dari masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan yang diharapkan terus diperbaiki dan ditingkatkan. Hasil aspirasi didapatkan dari proses penjangkaran aspirasi melalui wadah dan mekanisme yang akuntabel diantaranya adalah melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), forum diskusi, media sosial dan melalui survei pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil survei tahun 2024 triwulan II Nilai IKM 3,74 dengan kategori mutu pelayanan A (sangat baik).

Tabel 3.2 Capaian RPJM Nasional Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Baseline (2019)	Target RPJMN 2024	2020	2021	2022	2023		Indikasi 2024	
								Capaian LKIP	% Capaian	Capaian LKIP	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = (10) / (5)	(13)	(14) = (13) / (5)
1	Panjang Jalur Kereta Api	Km'sp	6.221	7.451	6326	6.466	6.642	6.880	92,34 (Baik)	6.927	93,02 (Baik)
2	Kondisi Jalur Kereta Api sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	81,5	94,0	82,83	90,34	91,37	93,85	99,84 (Baik)	94,0	100,00 (Baik)
3	Jumlah Kota Metropolitan dengan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, mMkassar)	Kota	1	6	1	4	4	4	66,67 (Cukup)	4	66,67 (Cukup)

Keterangan:

- Baik (jika capaian kinerja di atas 90% dibandingkan rencana)
- Cukup (jika capaian kinerja antara 60%-90% dibandingkan rencana)
- Kurang (jika capaian kinerja kurang dari 60% dibandingkan rencana)

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024 dan PK DJKA 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, LAKIP DJKA 2020, 2021, 2022, 2023



Tabel 3.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) DJKA 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Baseline (2019)	2020			2021			2022			2023			Indikasi 2024		
				Target	Capaian	% Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Target	Capaian	% Capaian	Target	PK 2024	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	IKP 1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Km'sp	0,32	0,31	0,33	106,45	0,416	0,416	100,00	0,436	0,436	100,00	0,450	0,45	100,00	0,45	0,45	100,00
2	IKP 2 Tingkat Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,15	0,24	0,19	120,83	0,19	0,23	78,95	0,23	0,18	121,74	0,15	0,10	133,33	0,09	0,09	100,00
3	IKP3 Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	69	72,00	79,00	109,72	78,00	90,72	116,31	91,00	91,00	100,00	91,00	90,33	99,26	90,50	95,17	105,16
4	IKP 4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	-	9,89	10,14	102,53	17,86	18,41	103,08	29,23	34,05	116,49	55,68	55,87	100,34	67,26	68,11	101,26
5	IKP 5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	-	11,22	12,45	110,96	25,80	26,18	101,47	42,17	42,10	99,83	56,00	59,71	106,63	68,78	68,77	99,99
6	IKP 6 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang sesuai dengan <i>Track Quality Index</i> (TDI) II dan II	%	81,50	82,00	82,83	101,01	86,99	90,34	103,85	90,00	91,37	101,52	92,87	93,85	101,06	94,00	93,93	99,93
7	IKP7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	-										3,45	3,69	106,96	3,7	3,74	101,08

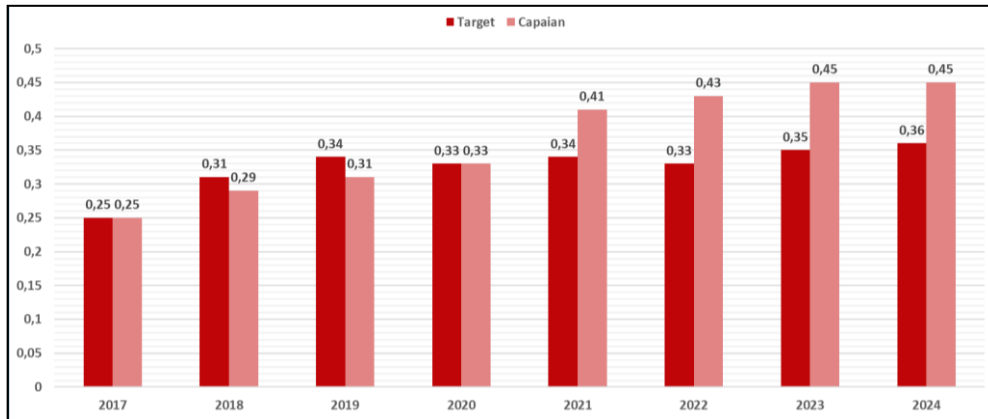
Keterangan:

- Baik (jika capaian kinerja di atas 90% dibandingkan rencana)
- Cukup (jika capaian kinerja antara 60%-90% dibandingkan rencana)
- Kurang (jika capaian kinerja kurang dari 60% dibandingkan rencana)

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024 dan PK DJKA 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, LAKIP DJKA 2020, 2021, 2022, 2023

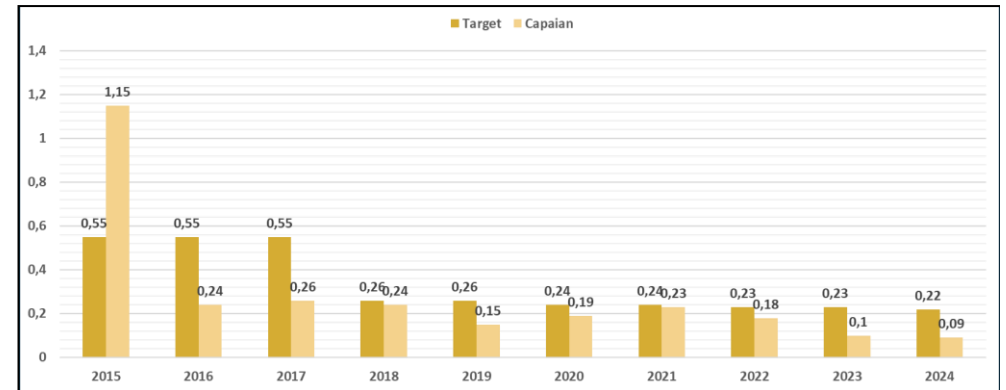


A. Rasio Konektivitas Antar Wilayah



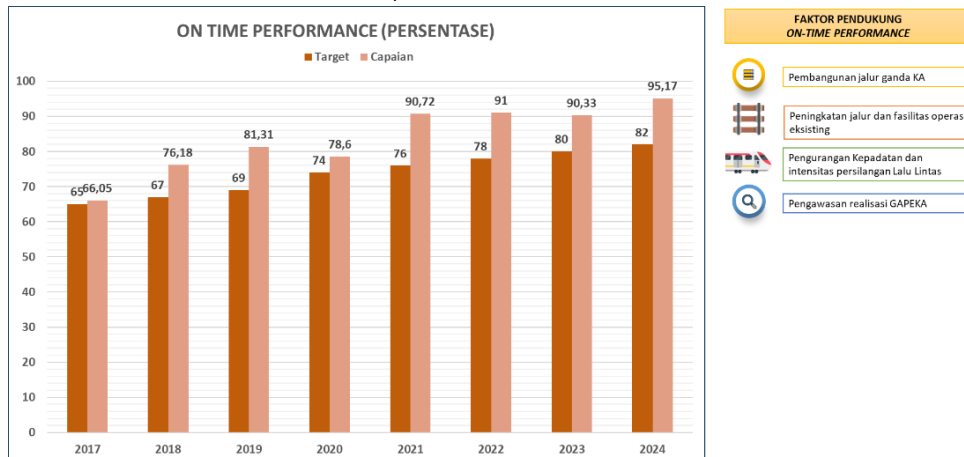
Catatan: Pada Tahun 2015 dan 2016 tidak ada IKU terkait Rasio Konektivitas Antar Wilayah

B. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate Of Accident*)



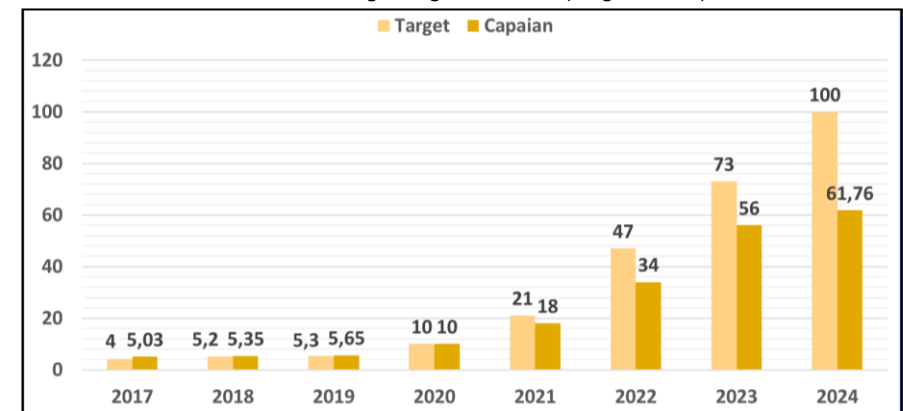
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi bahwa jenis kecelakaan Kereta Api terdiri dari *tabrakan antar Kereta Api, terguling, anjlok dan terbakar*.

C. Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP)



Catatan: Pada Tahun 2015 dan 2016 tidak ada IKU terkait *Rasio Konektivitas Antar Wilayah*

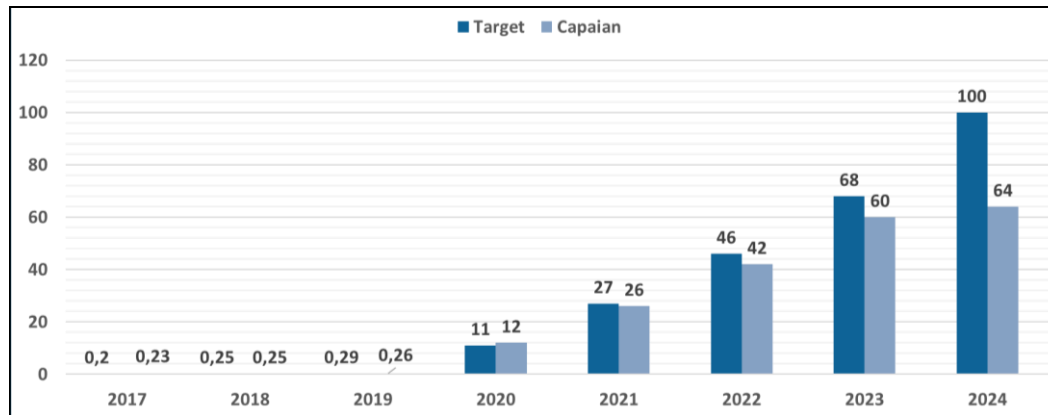
D. Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api



Peningkatan Angkutan ka (penumpang dan barang) sebagai upaya untuk mendorong peralihan penggunaan angkutan jalan raya/kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan umum massal yang lebih efektif dan efisien terutama di wilayah perkotaan

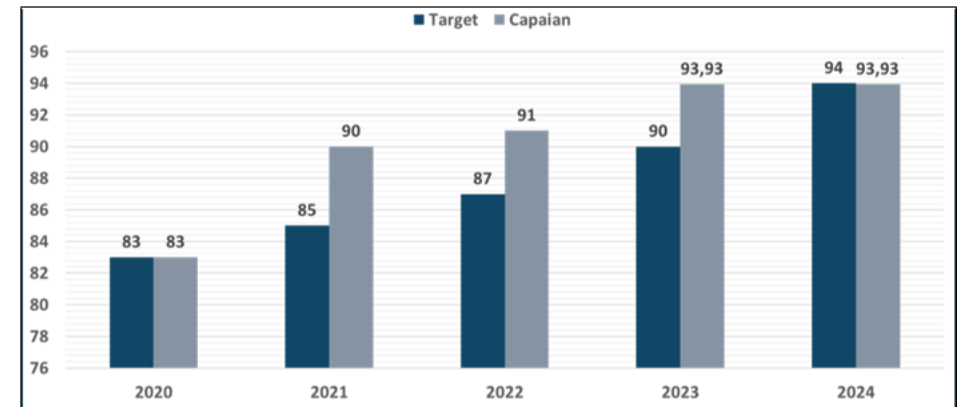


E. Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api



Peningkatan Angkutan KA (penumpang dan barang) sebagai upaya untuk mendorong peralihan penggunaan angkutan jalan raya/kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan umum massal yang lebih efektif dan efisien terutama di wilayah perkotaan

F. Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI



Catatan: Pada Tahun 2015 - 2019 tidak ada IKU terkait TQI

Gambar 3.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) DJKA 2020-2024





B A B 4

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

4.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah melalui:

1. Peningkatan konektivitas transportasi perkeretaapian melalui pembangunan jaringan kereta api antar kota, perkotaan, logistik dan reaktivitas jalur kereta api mati.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan konektivitas transportasi perkeretaapian melalui pembangunan jaringan kereta api antar kota, perkotaan, logistik dan reaktivitas jalur kereta api mati adalah konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah:

- a) Penyiapan dokumen pembangunan (*readiness criteria*)
- b) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota dan perkotaan.
- c) Reaktivasi jalur kereta api non-operasi.
- d) Pembangunan akses kereta api menuju pelabuhan dan bandara.

2. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Optimal.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang

optimal dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah:

- a) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja pelayanan angkutan kereta api
- b) Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting.
- c) Penerapan teknologi baru perkeretaapian.
- d) Peningkatan kinerja layanan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis.

3. Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian yang Andal.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang andal. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal adalah:

- a) Sertifikasi SDM Perkeretaapian.
- b) Sertifikasi sarana perkeretaapian.
- c) Sertifikasi prasarana perkeretaapian.
- d) Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian.
- e) Pemasangan perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO).
- f) Pemenuhan kebutuhan IMO.
- g) Penyusunan pedoman identifikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana.
- h) Penyusunan prosedur tindak lanjut akibat kecelakaan.
- i) Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api.

4.2 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Program pembangunan tahun 2025 difokuskan untuk penyelesaian KDP/kegiatan lanjutan, kegiatan kontrak tahun jamak dan pelaksanaan/implementasi dari Peraturan/Instruksi Presiden terkait bidang perkeretaapian. Fokus tersebut diwujudkan dalam program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian dan diuraikan menjadi pokok-pokok kegiatan sesuai dengan *outcome* Kementerian Perhubungan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan, diantaranya kegiatan:
 - a) *Infrastructure Maintenance and Operation*;
 - b) Penanganan perlintasan sebidang;
 - c) Peningkatan jembatan KA;
 - d) Peningkatan Kualitas SDM Perkeretaapian;
 - e) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian (audit, penegakan hukum, sosialisasi).
2. Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas, melalui penyiapan dokumen kegiatan:
 - a) Pembangunan Jalur KA;

- b) Reaktivasi jalur KA;
- c) Pengembangan akses jalur KA ke Pelabuhan dan Bandara.
- 3. Peningkatan kualitas layanan transportasi, diantaranya kegiatan:
 - a) Subsidi perintis;
 - b) Subsidi angkutan motor gratis pada masa Lebaran;
 - c) Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru;
 - d) Pengelolaan PSO;
 - e) Pemantauan dan evaluasi SPM, tarif dan kinerja angkutan KA.
- 4. Tata Kelola dan regulasi, diantaranya kegiatan:
 - a) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria termasuk penyederhanaan perijinan;
 - b) Belanja pegawai;
 - c) Layanan perkantoran;
 - d) Administrasi kegiatan.

4.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua program dan sembilan kegiatan terdiri dari:

- 1. Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan:
 - a) Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
 - b) Pelayanan Transportasi Perkeretaapian.
 - c) Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian.
 - d) Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.
- 2. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan:
 - a) Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian.
 - b) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian.
 - c) Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.
 - d) Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.
 - e) Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2025 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian 2025 – 2029 pada tujuan dan sasaran program dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Program DJKA Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET RENSTRA TAHUN 2025
1	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
	SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian	IKP 1 Rasio konektivitas antar wilayah	Rasio	0,45	0,45
2	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
	SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	IKP 2.1 Persentase <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	95	95
		IKP 2.2 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang sesuai Dengan TQI I dan II	%	94	0,95
		IKP 2.3 Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) terhadap Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Nilai	-	0,70
3	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
	SP3 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	IKP 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (rate of accident)	Rasio	0,05	0,08
4	Terlaksananya Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian yang Berkualitas				
	SP4 Meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bidang perkeretaapian	IKP4 Tingkat Kinerja Dukungan Teknis Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai	-	100%
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
	SP5 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan ²⁾ Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP5 Tingkat Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	-	70%



B A B 5

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi transportasi perkeretaapian dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan ***New Initiatives*** maka Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut dapat direview dan dilakukan penyesuaian.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan yang nyata di bidang perkeretaapian serta dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.



LAMPIRAN

Dengan mengacu pada reviu Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2024 dan draft Rencana Strategis tahun 2025 – 2029, diperoleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tiap-tiap unit kerja Eselon II dan Eselon III tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tabel dibawah ini.

A. UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

**Tabel I.1 Indikator Kinerja Kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
	Terlaksananya Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian yang Berkualitas			
1.	SK.SETDITJENKA 1 Meningkatnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Perkeretaapian	IKK.SETDITJENKA 1 Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	20
		IKK.SETDITJENKA 2 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian			
2.	SK.SETDITJENKA 2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK.SETDITJENKA 3 Indeks Profesional ASN	Nilai	89
		IKK.SETDITJENKA 4 Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3
		IKK.SETDITJENKA 5 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90
		IKK.SETDITJENKA 6 Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65
		IKK.SETDITJENKA 7 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	15
		IKK.SETDITJENKA 8 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Internal	%	81
		IKK.SETDITJENKA 9 Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85
		IKK.SETDITJENKA 10 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	100
		IKK.SETDITJENKA 11 Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,19
		IKK.SETDITJENKA 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	89,2
		IKK.SETDITJENKA 13 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89

**Tabel I.2 Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan			
1.	SK.DITLLAKA 1 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK.DITLLAKA 1 Persentase Realisasi Angkutan Kereta Api Bersubsidi	%	16
		IKK.DITLLAKA 2 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	16

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
		IKK.DITLLAKA 3 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	19
Terlaksananya Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian yang Berkualitas				
2.	SK.DITLLAKA 2 Meningkatkan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lalu Lintas Angkutan Kereta Api dan Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian	IKK.DITLLAKA 4 Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Lalu Lintas Angkutan Kereta Api yang telah disahkan	%	20
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
3.	SK.DITLLAKA 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	IKK.DITLLAKA 5 Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Nilai	83,45
		IKK.DITLLAKA 6 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Level	3
		IKK.DITLLAKA 7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Skala	3,7

**Tabel I.3 Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SK.DITPRASKA 1 Meningkatkan Konektivitas Jaringan Prasarana Perkeretaapian	IKK.DITPRASKA 1 Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Prasarana	%	65
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
2	SK DITPRASKA 2 Meningkatkan Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK.DITPRASKA 2 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	95,02
		IKK.DITPRASKA 3 Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal	%	65,27
		IKK.DITPRASKA 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,88

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
3.	SK.DITPRASKA 3 Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian	IKK.DITPRASKA 5 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,42
		IKK.DITPRASKA 6 Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	90,59
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
4	SK DITPRASKA 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKKDITPRASKA 7 Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,2
		IKKDITPRASKA 8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	15
		IKKDITPRASKA 9 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,76
		IKK.DITPRASKA 10 Presentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100
		IKKDITPRASKA 11 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	79

**Tabel I.4 Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat Sarana Perkeretaapian Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SK.DITSARKA 1 Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian	IKK.DITSARKA 1 Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	%	100
		IKK.DITSARKA 2 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	82,22
		IKK.DITSARKA 3 Persentase Sarana Perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck	%	90
		IKK.DITSARKA 4 Pemenuhan NSPK Bidang Sarana Perkeretaapian	%	100

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Terlaksananya Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian yang Berkualitas				
2.	SK.DITSARKA 2 Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Sarana Perkeretaapian	IKK.DITSARKA 5 Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitas Sarana Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti	%	28,5
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
3.	SK.DITSARKA 3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK.DITSARKA 6 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Level	3
		IKK.DITSARKA 7 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	87
		IKK.DITSARKA 8 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100
		IKK.DITSARKA 9 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	3,72

**Tabel I.5 Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SKDITKESKA 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	IKKDITKESKA 1 Persentase Hasil Audit SMKP yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	Persentase	100
		IKKDITKESKA 2 Persentase penindakan/penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan dan keamanan perkeretaapian	Persentase	100
		IKKDITKESKA 3 Pemenuhan NSPK Bidang Keselamatan dan Keamanan perkeretaapian	Persentase	100

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
2.	SKDITKESKA 2 Meningkatnya Pemenuhan SDM Perkeretaapian	IKKDITKESKA 4 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Perkeretaapian	Persentase	100
Terlaksananya Kebijakan Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian yang Berkualitas				
3.	SKDITKESKA 3 Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	IKKDITKESKA 5 Persentase Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/Sudah Ditindaklanjuti	Prosentase	100
		IKKDITKESKA 6 Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti	Prosentase	100
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
3.	SKDITKESKA 5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	IKKDITKESKA 7 Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,37
		IKKDITKESKA 8 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3
		IKKDITKESKA 9 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Prosentase	91
		IKKDITKESKA 10 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang keselamatan perkeretaapian	Prosentase	100
		IKKDITKESKA 11 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,86

B. UNIT ESELON III DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

**Tabel I.6 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SKBUP 1Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKKBUP 1 Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	17,44

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
2.	SKBUP 2 Meningkatkan Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKKBUP 2 Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM perkeretaapian	%	19,48
3.	SKBUP 3 Meningkatkan Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKKBUP 3 Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana perkeretaapian	%	17,97
4.	SKBUP 4 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Bidang Pengujian Perkeretaapian	IKKBUP 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	3,86
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
5.	SKBUP 6 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian	IKKBUP 5 Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	80,35
		IKKBUP 6 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	15
		IKKBUP 7 Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	81
		IKKBUP 8 Persentase Realisasi Pendapatan Balai Pengujian Perkeretaapian	%	100
		IKKBUP 9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	76,50
		IKKBUP 10 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	3,07

**Tabel I.7 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SKBPP 1 Meningkatkan Keandalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	IKKBPP 1 Persentase Penyelesaian Aset Kelola yang Diperbaiki	%	92

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian			
2.	SKBPP 2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Perawatan Perkeretaapian	IKKBPP 2 Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	80
		IKKBPP 3 Tingkat Maturitas SPIP Balai Perawatan Perkeretaapian	Level	3
		IKKBPP 4 Persentase Kualitas Pelaksanaan anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	%	91
		IKKBPP 5 Persentase Realisasi Pendapatan Balai Perawatan Perkeretaapian	%	100

**Tabel I.8 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan			
1.	SKBPKARSUMSEL 1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan sarana dan prasarana transportasi Kereta Api Ringan di wilayah Balai Pengelol	IKKBPKARSUMSEL 1 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Penumpang	4.205.183
		IKKBPKARSUMSEL 2 Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tepat Waktu	Persentase	99
		IKKBPKARSUMSEL 3 Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) terhadap Pelayanan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Skala	3,57
2.	SKBPKARSUMSEL 2 Meningkatnya Kehandalan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	IKKBPKARSUMSEL 4 Persentase Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang selesai Ditindaklanjuti	Persentase	100
		IKKBPKARSUMSEL 5 Tingkat Keselamatan Transportasi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Persentase	100
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian			
3.	SKBPKARSUMSEL 3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	IKKBPKARSUMSEL 6 Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Nilai	79
		IKKBPKARSUMSEL 7 Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Level	3

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
		IKKBPKARSUMSEL 8 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Persentase	81,7
		IKKBPKARSUMSEL 9 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Persentase	100

**Tabel I.9 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan			
1.	SKBPKASULSEL 1 Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKKBPKASULSEL 1 Rasio Konektivitas Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Rasio	0,24
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan			
2.	SK BPKASULSEL 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK BPKASULSEL 2 Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	99
3.	SK BPKASULSEL 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK BPKASULSEL 3 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	15,72
		IKK BPKASULSEL 4 Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu	%	94,6
		IKK5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	3,11
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan			
4.	SK BPKASULSEL 4 Meningkatnya Keselamatan	IKK6 Tingkat Keselamatan transportasi perkeretaapian di	%	100

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
	Transportasi KA di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan		
		IKK7 Persentase Gangguan Fasilitas Operasi yang sudah ditindaklanjuti	%	100
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
6.	SK BPKASULSEL 6 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK8 Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	80
		IKK9 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Level	15
		KK10 Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	80
		IKK11 Persentase realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	100
		IKK 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPKA Sulawesi Selatan	Nilai	60
		IKK13 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran BPKA Sulawesi Selatan	Nilai	3,1

**Tabel I.10 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SKBTP 1 Meningkatkan Konektivitas Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 1 Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0,5
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
2.	SKBTP 2 Meningkatkan Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 2 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	91,5
		IKKBTP 3 Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	55,35

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
3.	SKBTP 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	59,8
		IKKBTP 5 Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
4.	SKBTP 4 Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 6 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
6.	SKBTP 5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 7 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	81,75
		IKKBTP 8 Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	3
		IKKBTP 9 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	85,58
		IKKBTP 10 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100

**Tabel I.11 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SKBTP 1 Meningkatnya Konektivitas Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 1 Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0,5
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
2.	SKBTP 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 2 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian		74,1
3.	SKBTP 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta	IKKBTP 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	25

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
	Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 5 Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
4.	SKBTP 4 Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 6 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
5.	SKBTP 5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 7 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	82,5
		IKKBTP 8 Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian	Level	3
		IKKBTP 9 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	86
		IKKBTP 10 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100
		IKKBTP 11 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	3

**Tabel I.12 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Palembang Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1	SKBTP 1 Meningkatnya Konektivitas Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 1 Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0,71
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
2	SKBTP 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 2 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	92,10
		IKKBTP 3 Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal	Persentase	27,71

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
		di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian		
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
4	SKBTP 4 Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 4 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
5	SKBTP 5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 5 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	81,9
		IKKBTP 6 Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian	Level	3
		IKKBTP 7 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	93,9
		IKKBTP 8 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100

**Tabel I.13 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan			
1.	SKBTP 1 Meningkatnya Konektivitas Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 1 Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0,62
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan			
2.	SKBTP 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 2 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	91
		IKKBTP 3 Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	98,88

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
3.	SKBTP 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	18,76
	Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan			
4.	SKBTP 4 Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100
		IKKBTP 6 Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Lokasi	5
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian			
5.	SKBTP 6 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 7 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	81,2
		IKKBTP 8 Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian	Level	3
		IKKBTP 9 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	82,3
		IKKBTP 10 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100

**Tabel I.14 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SKBTP 1 Meningkatnya Konektivitas Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 1 Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0,55

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
2.	SKBTP 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 2 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	88
		IKKBTP 3 Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	70,65
3.	SKBTP 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	53,4
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
4.	SKBTP 4 Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
5.	SKBTP 5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 6 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	81,75
		IKKBTP 7 Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian	Level	3
		IKKBTP 8 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	82
		IKKBTP 9 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100

**Tabel I.15 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SKBTP 1 Meningkatnya Konektivitas Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 1 Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0,75
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
2.	SKBTP 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 2 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	99,47
		IKKBTP 3 Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	87,50
3.	SKBTP 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	18,34
		IKKBTP 5 Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100
		IKKBTP 6 Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA pada Perlintasan Sebidang	Persentase	10
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
4.	SKBTP 4 Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 7 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
5	SKBTP 5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 8 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	82,0
		IKKBTP 9 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Level	15
		IKKBTP 10 Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Persentase	81
		IKKBTP 11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100
		IKKBTP 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal balai teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Nilai	82,30
		IKKBTP 13 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Nilai	3,07

**Tabel I.16 Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
1.	SKBTP 1 Meningkatnya Konektivitas Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 1 Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio	0,39
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
2.	SKBTP 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 2 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	98,10
		IKKBTP 3 Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	37,9
3.	SKBTP 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	19
Terwujudnya Perkeretaapian Yang Terhubung, Terintegrasi Serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan				
4.	SKBTP 4 Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
5.	SKBTP 5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	IKKBTP 6 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	83,4
		IKKBTP 7 Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	15,00
		IKKBTP 8 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	81
		IKKBTP 9 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase	100



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



